

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi fokus utama pembangunan suatu perekonomian dalam negara berkembang yang harus diselesaikan oleh negara itu sendiri. Hal ini dibuktikan masih besarnya persentase jumlah penduduk miskin. Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan berbagai penyebab salah satunya pendapatan yang rendah. Persoalan kemiskinan juga dapat dipicu karena masih rendahnya kualitas hidup manusia, upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, dan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Kebijakan pengentasan kemiskinan menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dengan peran negara yang sangat dominan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi sebesar tujuh sampai delapan persen (Bappenas RI, 2015). Suryawati menjelaskan kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup atau dalam arti luas kemiskinan merupakan suatu fenomena *multiface* atau multidimensional. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal dan lainnya.

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, tingkat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*World Bank, 2010*).

Pendapat SDGs tingkat kemiskinan absolut suatu negara harus berada pada level di bawah 10% apabila berada pada level diatas 10% maka tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut hidup dengan pendapatan dibawah \$1/hari dan kemiskinan menengah hidup dengan pendapatan \$2/hari. BPS menghitung tingkat kemiskinan didasarkan pada pengeluarannya dibawah Garis Kemiskinan (GK) atau jumlah rupiah konsumsi

Dinda Pertiwi, 2023

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori/orang/hari dan non makanan yang apabila dirupiahkan setiap tahunnya berbeda dan selalu meningkat. Kemudian BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang kemiskinannya relatif cukup tinggi setiap tahunnya. Berikut persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011-2021.



Gambar 1.1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2021

Sumber : BPS 2021, data diolah

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat persentase jumlah penduduk miskin setiap tahunnya masih berfluktuasi atau naik dan turun tetapi tidak dibawah 10% kecuali mulai dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan yang angka jumlah penduduk kemiskinannya di bawah 10%. Peristiwa tersebut merupakan hal yang baik karena tingkat kemiskinannya tidak tinggi. Tetapi pada saat tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan kembali dan menyentuh angka 10% maka dapat dikatakan kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan tidak stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan dimana kemiskinan tidak hanya persoalan individu tetapi juga merupakan persoalan kebijakan pemerintah.

Dinda Pertiwi, 2023

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi dan saling berkaitan namun dalam penelitian ini penulis memilih variabel upah minimum provinsi karena kemiskinan dapat diatasi melalui upaya peningkatan pendapatan bagi penduduk yang bekerja sebagai pekerja, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan melalui upah (Islami&Anis, 2019). Salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan adalah membuat kebijakan menaikkan upah minimum dengan mempertimbangkan karakteristik dari setiap Provinsi. Upah minimum di Indonesia ditetapkan dengan dua maksud yaitu meningkatkan standar hidup buruh dan melindungi pekerja dengan upah rendah. Kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Kurniawati dkk, 2017). Di Indonesia sektor informal (*uncovered sector*) lebih dominan daripada sektor formal (*Covered Sector*). Ditahun 2015 diketahui sebesar 52% penduduk yang bekerja di Indonesia berada di sektor formal dan pasar tenaga kerja di dominasi oleh tenaga kerja tidak terlatih (*unskilled worker*) (Pusdatinaker, 2015). Pada tahun 2018 penduduk yang bekerja pada sektor formal 42% dan didominasi oleh pekerja tidak terlatih (detik, 2018).

Upah minimum memiliki dampak yang berbeda beda terhadap tingkat kemiskinan suatu negara dan masih menjadi perbincangan yang hangat menurut beberapa ekonom, ada beberapa ekonom dan pembuat kebijakan tidak sejalan dengan tujuan diadakannya upah minimum dan berusaha untuk mengurangi peraturan upah minimum agar pasar tenaga kerja lebih fleksibel dan meningkatkan daya saing. Kekakuan di pasar tenaga kerja seperti kekakuan upah yang disebabkan oleh upah minimum dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pada gilirannya memberikan kontribusi pada pengangguran dan kemiskinan (Gindling dan Terrell, 2010).

Davis dan More berpendapat adanya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan akibat perbedaan upah tenaga kerja (Hurst, 2004). Menurut peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan upah minimum adalah batas bawah atau upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibayarkan kepada buruh atau pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Upah minimum dibagi menjadi dua yaitu ada Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/kota. Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh

kabupaten/kota di dalam wilayah satu provinsi, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di dalam wilayah satu kabupaten/kota. Upah minimum di tetakan oleh Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja.

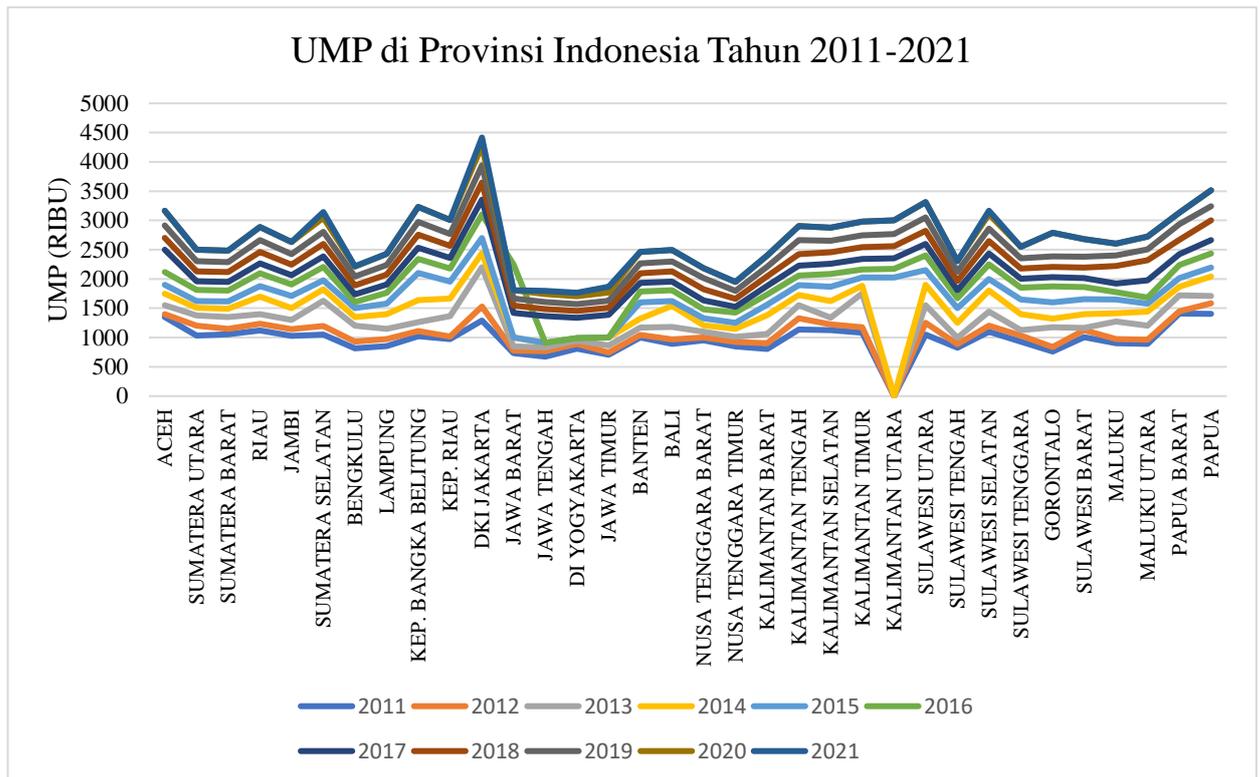
Upah minimum di Indonesia masih belum merata dalam pendistribusian upahnya disetiap provinsi. Tidak meratanya kenaikan upah minimum atau adanya ketimpangan pendistribusian pendapatan di karenakan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi salah satunya kebijakan upah minimum provinsi. Walaupun setiap tahun mengalami kenaikan upah minimum tetapi kemiskinannya tidak selalu mengalami penurunan dikarenakan adanya karakteristik yang berbeda setiap provinsi dan adanya inflasi yang terus menerus naik sehingga nilai riil pendapatan seseorang menurun. Berikut data upah minimum provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2021.



Gambar 1.2 Upah Minimum Provinsi di Indonesia tahun 2011-2021

Sumber : BPS 2021, data diolah

Dapat dilihat dari gambar 1.2 bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahunnya mengalami kenaikan sedangkan untuk kemiskinannya masih mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Upah ini dapat dinikmati oleh para pekerja baik sektor formal maupun informal sehingga penelitian ini memakai sektor formal dan informal. Berikut juga dilampirkan tabel UMP per provinsi pada tahun 2011-2021.



Gambar 1.3 UMP di Indonesia per provinsi tahun 2011-2021

Sumber : BPS 2021, diolah

Dari gambar 1.3 bisa dilihat setiap tahunnya per provinsi mengalami kenaikan, dapat dilihat upah minimum 2021 di provinsi Jawa Barat dimana UMPnya Rp.1.810.351 dan tertinggi DKI Jakarta sudah menyentuh angka Rp.4.500.000 yang seharusnya tingkat kemiskinan di Indonesia bisa dibawah rata-rata apabila memang kenaikan upah minimum terbukti dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2011-2014 Kalimantan Utara belum terbentuk sehingga UMP pada provinsi tersebut belum ada dan data menjadi *unbalanced panel*.

Penelitian Ayu (2018) meneliti bahwa upah minimum dan kemiskinan memiliki hubungan signifikan yang positif dimana upah minimum naik tetapi kemiskinan juga naik. Penelitian dari Overstreet (2021) juga menemukan hasil *empirical gap* bahwa kenaikan upah minimum meningkatkan sedikit kemiskinan bukan mengurangi kemiskinan artinya dimana apabila upah minimum meningkat maka kemiskinan juga ikut meningkat. Sedangkan penelitian lain menemukan hasil upah minimum memiliki pengaruh hubungan yang negatif dimana saat upah minimum

Dinda Pertiwi, 2023

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dinaikan maka kemiskinan juga akan berkurang (Kurniawati, dkk. 2017; Utami & Masjkuri, 2018; Addison & Mckinley, 1999).

Penelitian Gindling (2010) meneliti upah minimum terhadap kemiskinan di Honduras dan hasilnya kenaikan upah minimum memiliki efek pengurangan kemiskinan yang sederhana di Honduras. Efek pengurangan kemiskinan hanya berpengaruh di kalangan pekerja sektor perusahaan besar tetapi tidak untuk sektor perusahaan kecil atau sektor yang tertutup. Penulis juga menemukan hasil *empirical gap* yang tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kenaikan upah minimum tidak ada pengaruh positif maupun negatif terhadap kemiskinan (Bird & Manning, 2008). Pada penelitian Joseph dan Richard (2010) mereka tidak menemukan hasil yang sama pada penelitian yang sudah di bahas. Pada penelitian mereka upah minimum tidak signifikan terhadap kemiskinan yang artinya kenaikan upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan ini di dukung oleh hasil penelitian dari Chairunnisa dan Qintharah (2022). Berdasarkan *empirical gap* yg berbeda-beda hasil penelitiannya maka penulis tertarik meneliti mengenai tentang bagaimana **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2011-2021 (Studi Kasus pada 34 provinsi di Indonesia)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Indonesia pada tahun 2011-2021?
2. Bagaimana Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa pada tahun 2011-2021?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2021 dan untuk mengetahui tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa tahun 2011-2021.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dinda Pertiwi, 2023

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Dari segi ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu ekonomi.
 - c. Dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktik
- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia.
 - b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai media informasi terkait konsep keilmuan tentang upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia baik secara teoritis maupun praktis.

1.5 Struktur organisasi penulisan skripsi

Struktur organisasi penulisan skripsi atau bisa disebut sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I ini merupakan bab perkenalan dimana adanya latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi penulisan skripsi.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab II ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari konsep dan teori-teori yang mendukung disertai dengan kajian empiris, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab III berisi mengenai objek dan subjek penelitian, metode penelitian definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik dan alat pengumpulan data dan teknis analisis data dalam penelitian ini.

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bagian ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dicapai dan terdiri dari deskripsi subjek penelitian, deskripsi objek penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis serta analisis temuan dan pembahasan.

5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian ini mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak yang terkait, baik yang membutuhkan ataupun untuk keperluan penelitian selanjutnya.